BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Blater*

Menurut Wiyata, *blater* adalah seseorang yang perilakunya cenderung mengarah ketindakan kriminal seperti berjudi, mabuk-mabukkan dan poligami/main perempuan (melacur)[1]. Sedangkan menurut Abdur Rozaqi, *blater* adalah orang yang memiliki kepandaian dalam hal olah kanuragan, terkadang disertai pula dengan ilmu kekebalan dan kemampuan magis yang menambah daya kharismatis lainnya. Ia juga memiliki kemampuan dalam ilmu agama, tetapi sebatas untuk pengembangan dirinya semata. Yang menonjol justru peran "sosialnya" sebagai orang kuat di desa.[2]

Istilah lain dari *blater* adalah *bajingan*. Namun, menurut komunitas *blater*, status sosial bajingan dipandang lebih rendah. *Bajingan* dikenal sebagi sosok yang angkuh, kasar, sombong dan suka membuat keonaran. Aktivitas yang melekat pada *bajingan* adalah; berjudi, minuman keras, main perempuan, poligami, mencuri, merampok, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Dalam realitas, karakter dan aktivitas di atas bisa saja melekat pada kaum *blater*, sehingga sulit membedakan keduanya. [3] Media sosial *blater* yang paling terkenal

---

[1] Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 63-70

[2] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kyai Dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004), hlm. 9

[3] Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 63-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *rèmoh rèmoh, carok, keraben sapèh, sabung ajem, ando'an dereh*, dan sejenis arena perjudian lainnya.[4]

Sebenarnya, Peristilahan yang menggambarkan sosok orang yang kuat diberbagai daerah memiliki perbedaan meskipun peran subtantifnya terkadang sama. untuk di Madura istilah populernya *blater*, untuk daerah Banten terkenal dengan *jawara*, dan di Jawa ada sebutan *bandit*, *kecu* dan lainnya.[5]

Dalam kontek Madura, secara historis fenomena ke*blater*an dalam banyak hal seringkali merujuk pada sosok jago sebagai orang kuat desa. Karena *konstruksi* tentang ke*blater*an sangat terkait pula dengan *konstruksi* jagoanisme di dalam masyarakat. *Blater* adalah orang kuat di *Madura*, baik secara fisik maupun *spiritual* dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal. Seorang jago/*blater* dapat mengumpulkan pengikut, anak buah dan kekuatannya bergantung tidak saja pada kemampuannya dalam mengelola kekerasan, juga jumlah anak buah yang dimilikinya.[6]

Seorang jago/*blater* merupakan buah dari *eksploitasi* oleh "*kekuasaan kembar*" yakni para kaum *aristokrat-ningrat* yang menjalankan birokrasi kekuasaan berkolaborasi dengan kekuasaan Belanda yang tidak saja memeras ekonomi rakyat, tetapi juga fisik dan mentalitas masyarakat. Dalam kondisi demikian, tidak jarang muncul pencurian tanam pangan, sapi dan komoditi

---

[4] Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*…10.
[5] Lihat M.A Timahi, *Kyai dan Jawara di Banten*, Tesis Dalam Program Studi Antropologi Pasca Sarjana UI, 1992.
[6] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kyai Dan Blater Sebagai Rezim Kebar di Madura*, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004), hlm. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang disertai dengan kekerasan, bahkan pembunuhan[7] Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki peran signifikan ditengah masyarakat. Sejak di era prakolonial organisasi jago menjadi satu-satunya alat penguasa. Bahkan seorang raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun untuk menjadi Raja, sebelumnya harus memiliki *wahyu kedaton* sebagai legitimasi. Dalam prakteknya kekuatan politik seorang penguasa tak jarang diukur dari kapasitas personal melalui banyaknya jumlah pengikut yang dimilikinya sehingga sosok raja tidak lain adalah seorang super jago.[8]

Sejarah *blater* di Madura tidak bisa dipisahkan dari kondisi sistem ekologis Madura, kemunculan komunitas *blater* terkait pula dengan ekosistem tegalan dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat terbatas membuat para petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba terbatas. Kondisi ini secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan kemiskinan dikalangan warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan keuntungan ekonomis disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari tahun ketahun menciptakan problem ekonomis yang cukup kuat. Kondisi ini tak jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi yang dianggap strategis guna memperbaiki masa

---

[7] Hub De Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam*, (Jakarta: Gramedia: Jakarta, 1989), hlm. 76

[8] Onghokham. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*. (Jakarta: Kompas, 2002), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depannya. Sekalipun pada kenyataannya migrasi bukan pula jalan satu-satunya dalam perbaikan nasib atau cara untuk dapat bertahan hidup *(survival of life)*. Cara lain yang oleh sebagian anggota masyarakat dipandang sebagai cara atau jalan "hitam" adalah dengan menjadi bandit atau *blater*. Kondisi awal ke*blater*an adalah cara bagi anggota masyarakat untuk bertahan hidup akibat kemiskinan yang dideritanya. Tindakan mencuri, bahkan terkadang dengan membegal (merampok) adalah gerak spontan agar dapat bertahan hidup. Bahkan jalan pintas mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan menjadi *bandit*, preman dan sejenisnya. Meskipun pengalaman ini tidak hanya terjadi di Madura semata.[9]

Tumbuhnya komunitas *blater* sebagai suatu kekuatan sosial masyarakat, terutama dikawasan pedesaan. Dengan demikian, merupakan produk dari pergumulan sosiologis masyarakat. Dalam konteks per*bandit*an atau ke*blater*an ini, Goerge Rude (1985) mengklasifikasikan menjadi tiga bagian; 1) *Kejahatan akuisitif* (ketamakan), 2) *Kejahatan social* dan *survival*, 3) *Kejahatan protes*[10]

Menurut Holilah[11], Dalam realitas masyarakat Madura, *blater* dibedakan menjadi dua, yaitu: *blater "pol"/blater "rajeh"* (*blater* papan atas) dan *blater* "tanggung" (*blater* biasa). Kedua pengkategorian *blater* di atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

---

[9] Hobsbawm, Eric. *Bandits*. New York: Pantheon Books, 1981.
[10] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa…*hlm. 62
[11] Holilah, *Blater dan Poligami pada Masyarakat Madura*, (Laporan Peneliteian, LP2M UINSA, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Blater "pol"/blater "rajeh"* (*blater* papan atas)

- Memiliki kekuasaan
- Memiliki anak buah/kelompok
- Berposisi sebagai pemimpin kelompok
- Memiliki pengaruh/ditakuti di masyarakat
- Namanya dikenal sampai keluar daerah (lintas desa/lintas kecamatan)
- Mapan secara ekonomi
- Dapat membuat dan meredam konflik di masyarakat

b. *Blater "tanggung"* (*blater* biasa).

- Tidak memiliki anak buah/kelompok
- Meskipun memiliki kelompok, hanya berposisi sebagai anak buah
- Kurang memiliki pengaruh/kurang disegani masyarakat
- Dan secara ekonomi kurang mapan.

B. Teori Intervensi Politik

Secara umum intervensi merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu. Pada kegiatan birokrasi dan politik intervensi yang dimaksut merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat politik dalam mempengaruhi proses rekrutmen dan promosi birokrat pada jabatan birokrasi.[12]

Menurut Mayo, tingkatan intervensi dibagi menjadi tiga hal: *pertama* adalah *grassroot* ataupun *neightbourhood* (pelaku perubahan melakukan intervensi

[12] http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/2016/08/08/sosi4304-teori-dan-metode-intervensi-sosial/. Diakses 03 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut). *Kedua, local agency* dan *inter-agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung ditingkat lokal, provinsi ataupun ditingkat yang lebih luas, bersama jajaran pemerintahan yang terkait serta organisasi non pemerintahan yang berniat terhadap hal tersebut). *Ketiga, regional* dan *national community planning work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap isu terkait).[13]

Helden juga menjelaskan beberapa penyebab mengapa intervensi politik terhadap birokrasi sulit dihindari. Ia menulis mengapa penyebab tersebut dapat terjadi, antara lain:

1. Masih kuatnya primordialisme politik, dimana ikatan kekerabatan, politik balas budi, keinginan membangun pemerintahan berbasis keluarga, mencari rasa aman, dan perilaku oportunis birokrat.
2. Mekanisme *check and balance* belum menjadi budaya dan belum dilaksanakan dengan baik.
3. Kekuasaan yang dimiliki politisi cenderung untuk korup sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, "*power tends to corrupt*."
4. Kondisi kesejahteraan aparatur birokrat atau sipil negara di daerah yang rendah cenderung melahirkan praktek *rent seeking*. Melalui aktifitas politik tersembunyi demi mendapat *income* tambahan.
5. Perangkat aturan yang belum jelas dan mudah dipolitisi, seperti lemahnya instrumen pembinaan pegawai, kode etik belum melembaga, adanya status

[13]http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/2016/08/08/sosi4304-teori-dan-metode-intervensi-sosial/. Diakses 03 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada daerah sebagai pembina kepegawaian, dan rangkap jabatan kepala daerah dengan ketua umum parpol.[14]

C. Relasi Sosial *Blater* Dengan Masyarakat di Madura

Relasi *blater* merujuk pada sosok orang kuat di desa yang bisa memberikan "perlindungan" keselamatan secara fisik terhadap masyarakat. *Blater* juga merupakan kelompok sosial yang cukup berpengaruh dikalangan masyarakat Madura. Sehingga tidaklah mengherankan jika Kaum *blater* masih dominan diposisi sebagai elite pedesaan, akan tetapi belum begitu eksis dan tampil dominan sebagai elite perkotaan. Di pedesaan, komunitas *blater* masih memainkan peran sebagai broker keamanan dalam interaksi ekonomi dan sosial politik. Selain itu, tak sedikit yang bermain di dua kaki, selain sebagai broker keamanan juga sebagai tokoh formal, yakni menjadi *state apparatus* dengan cara menjadi *klebun* (kepala desa). Di banyak tempat di pedesaan Madura, tak sedikit *klebun* desa berasal dari komunitas *blater* atau dipegaruhi oleh politik per*blater*an.[15]

Sedangkan Abdur Rozaki mengatakan bahwa *blater* adalah *representasi* dari "dunia sosial" yang lain, yang lebih dekat dengan dunia kriminal, aksi kekerasan (*carok*), kejahatan sekalipun terkadang muncul pula dalam bentuk

[14] http//politik.kompasiana.com/2012/04/24/birokrasi-vs-politik-457730.html. Diakses tanggal 03 Agustus 2017.
[15] Holilah, *Blater dan Poligami pada Masyarakat Madura*. (Laporan Peneliteian, LP2M UINSA, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat *ambivalen*, yakni membawa perwatakan (sosial) yang halus, sekaligus keras dan kasar, melindungi tetapi sekaligus terkadang menindas.[16]

Dari sudut pandang sosial, *blater* dapat muncul dari strata dan kelompok sosial manapun didalam masyarakat Madura seperti santri atau lingkungan sosial *blater*. *Blater* yang memiliki latar belakang santri, umumnya pandai mengaji dan membaca kitab kuning. Bagi masyarakat Madura hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Konteks ini pula yang membuat *blater* dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok Kyai.[17]

Secara kultural, peranan dan pengaruh *orèng blater* biasanya diperoleh karena dua hal. *Pertama*, kemampuan dalam ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu kekebalan, sikap pemberani dan jaringan anak buah yang banyak dan luas. Sukses meraih kemenangan carok dan keberhasilan dalam mencegah konflik (kekerasan) antar individu dalam masyarakat semakin memperkuat pengaruh dan sosoknya sebagai *orèng blater*. *Kedua*, keterlibatannya dalam dunia kriminalitas dan aksi kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung menjadikan *orèng blater* semakin "disegani", bukan saja oleh masyarakat, tapi juga oleh aparat negara.[18]

Sosok *blater* juga memiliki jaringan yang luas (antar desa/kabupaten). Daya kharismatis dan luasnya jaringan sosial yang dimiliki seorang *blater* menciptakan pengaruh sampai melampaui lingkungan desanya dimana ia

[16] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa…*hlm. 13
[17] Ibid
[18] Ibid hal, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal. Media sosial *blater* yang sangat dikenal di Madura adalah *remoh*. Di dalam *remoh* para *blater* saling bersosialisasi membangun pertemanan, saling *sharing* dan memberikan sejumlah uang pada penyelenggara *remoh*, mirip arisan. Penyelenggaraan *remoh* saling bergiliran. Di dalam *remoh* biasanya ada hiburan Madura seperti *sandur*, serta hidangan berupa minum-minuman keras[19]

D. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Ini tercermin dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat"..

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik

[19] Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*…11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengutamakan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

E. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa dan perangkat desa, dan itu banyak di atur di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai : "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepela desa dan perangkat desa.

F. Program Pembangunan desa

Selama dua dekade terakhir ini, berkembang kekecewaan terhadap hasil dan upaya-upaya pembangunan di banyak negara, khususnya di negara sedang berkembang. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar, dan dalam bayak kasus, kondisi penduduk miskin semakin terpuruk. Ungkapan tradisional sosial ekonomi pedesaan seringkali "dirusak" tanpa digantikan oleh suatu alternatif yang lebih baik.

Terkait dengan pembangunan desa maka perlu pengkajian ulang terhadap strategi pembangunan pedesaan di masa lalu dan kemudian belajar dari pengalaman tersebut untuk memformulasikan suatu strategi baru yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik di masa depan merupakan suatu keniscayaan. Beberapa isu penting berkenaan dengan dengan pembangunan pedesaan perlu dipahami dengan baik, yakni: *Pertama,* pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber daya dipengaruhi oleh sistem ekonomi,sosial dan politik yang ada. Oleh karena itu, kita tidak dapat menjelaskan permasalahan pedesaan secara parsial hanya dengan menggunakan kerangka situasi pedesaan semata. Daerah miskin pedesaan dan penduduk pedesaan berada pada situasi marginal, mereka bukan merupakan bagian dari suatu sistem secara keseluruhan. Mereka jarang sekali berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, banyak masyarakat pedesaan bersikap apatis terhadap program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, pengertian pembanguan harus dipahami bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan juga membutuhkan perubahan infrasturktur sosial dan politik, hubungan-hubungan kemanusiaan, dan khususnya dalam struktur kekuasaan.

Kedua, pembagunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembagunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari suatu pemaduan berbagai elemen: tujuan yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya (alam maupun manusia), teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Oleh karena itu, jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Pertanian memiliki fungsi yang sangat penting di dalam proses pembagunan. Di dalam proses pembangunan dimana setiap elemennya saling berhubungan satu sama lain, pertanian memilki beberapa fungsi yang sangat penting: 1) yang paling mendasar adalah sebagai penghasil pangan dan bahan baku bagi sektor pangan itu sendiri bagi penduduk non-pertanian, dan bagi pengembangan industri: 2) sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling besar; 3) perkembangan sektor pertanian yang akan menciptakan permintaan akan produk-produk non-pertanian yang merupakan prasyarat bagi ekspansi sektor sekunder dan tersier; dan 4) sektor pertanian dapat menjadi penghasilan devisa dari hasil ekspor produk-produk pertanian komersial

Sedangkan yang *keempat,* Pembangunan pertanian merupakan salah satu aspek dari pembangunan pedesaan. Fungsi sektor pertanian dalam proses pembangunan seperti disinggung di atas mengindikasikan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berkembang baik jika tidak dilakukan secara simultan dengan sektor-sektor lain [20].

Dengan demikian, diharapkan bahwa pembangunan bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan materil, tetapi juga lebih penting adalah pembangunan manusia seutuhnya. Membangun mental masyarakat merupakan masalah yang memerlukan pemikiran dan waktu. Hal ini menyangkut perubahan-perubahan pola pikir, sikap terhadap nilai, norma-norma maupun perubahan orientasi masa lampau kemasa nyata dan rasional dalam

[20] Arsyad, Lincolin, *et al*. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencari sasaran pembangunan. Artinya, yang perlu dipertahankan adalah nlai-nlai lokal yang terbukti berhasil dan bertahan mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa tersebut.

Dalam program desa harus mengacu pada peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 tentang prioritas program desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbaru dan pelestarian lingkungan hidup
8. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id